

Nomor : 9273/D.1.2/04/2024 02 April 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Sosialisasi Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Yth. **Daftar Terlampir**  
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus yaitu pemberian pendapat untuk pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa di Desa, kami bermaksud untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Sosialisasi Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada 2 lokasi wilayah di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Adapun wilayah tersebut terdiri *batch* 2 dari **Wilayah 1** (khusus wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, NTT) dan *batch* 3 **Wilayah 2** (khusus wilayah Sumatera).

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I dari Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten/Kota untuk dapat menghadiri kegiatan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Wilayah 1** : Selasa/7 Mei 2024 dan Rabu/8 Mei 2024  
**Wilayah 2** : Selasa/21 Mei 2024 dan Rabu/22 Mei 2024  
Waktu : 09:00 - 16:00 WIB  
Tempat : **Wilayah 1** : Kota Yogyakarta  
**Wilayah 2** : Kota Medan  
Agenda : Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Sosialisasi Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pada kegiatan ini LKPP hanya akan menanggung biaya paket meeting *fullday* sebanyak 1 (satu) hari pada pilihan tanggal yang ditentukan di atas untuk maksimal 21 kabupaten/kota per hari pelaksanaan. Adapun detil teknis pelaksanaan kegiatan kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi pegawai kami Sdr. Lingga Sakti (0877-8863-1305). Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Strategi dan  
Kebijakan Pengadaan Khusus,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : RHBWHP  
Nomor Tiket : SK202404020012

Tembusan :  
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

**Token** : RHBWHP  
**Nomor Tiket** : SK202404020012

## Lampiran 1. Ketentuan Pendaftaran Pendampingan

### **KETENTUAN PENDAFTARAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DAN SOSIALISASI MODEL DOKUMEN SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BATCH 2 PADA 7 DAN 8 MEI 2024 DI WILAYAH JAWA, KALIMANTAN, BALI, NTB, NTT DAN BATCH 3 PADA 21 DAN 22 MEI 2024 DI WILAYAH SUMATERA**

Pendaftaran peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Sosialisasi Keputusan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa di **Wilayah 1** (khusus wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, NTT) dan **Wilayah 2** (khusus wilayah Sumatera) dengan total peserta maksimal 64 (enam puluh empat) orang yang berasal dari:
  - a. 2 (dua) orang dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
  - b. 1 (satu) orang dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
2. Peserta mendaftar pada:
  - a. tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-1-Pendaftaran-Desa> paling lambat tanggal **26 April 2024** pukul 15.00 WIB untuk **Wilayah 1**.
  - b. tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-2-Pendaftaran-Desa> paling lambat tanggal **3 Mei 2024** pukul 15.00 WIB untuk **Wilayah 2**.
3. Peserta memilih tanggal pelaksanaan pada formulir pendaftaran seperti ketentuan no 2 di atas dan masing-masing Kabupaten/Kota hanya dapat mengikuti **1 hari/1 tanggal kegiatan**.
4. LKPP akan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti kegiatan pendampingan.
5. Pengumuman peserta yang dapat mengikuti kegiatan pendampingan akan diumumkan pada:
  - a. tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-1-PengumumanDesa> pada tanggal **29 April 2024** untuk **Wilayah 1**.
  - b. tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-2-PengumumanDesa> pada tanggal **6 Mei 2024** untuk **Wilayah 2**serta akan dihubungi via **whatsapp** yang didaftarkan pada form pendaftaran peserta.
6. Untuk pembiayaan kegiatan di tanggal 7 dan 8 Mei 2024 untuk **Wilayah 1** dan tanggal 21 dan 22 Mei 2024 untuk **Wilayah 2**, LKPP hanya menanggung biaya **paket meeting (tempat pelaksanaan, makan siang dan coffee break)**. **Biaya Perjalanan Dinas berupa akomodasi/penginapan, transportasi dan uang saku peserta dibebankan pada anggaran masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota**.
7. Setiap Kabupaten/Kota menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa melalui tautan pada:
  - a. tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-1-DIMDesa> paling lambat tanggal **3 Mei 2024** untuk **Wilayah 1**.
  - b. pada tautan <https://tinyurl.com/Wilayah-2-DIMDesa> paling lambat tanggal **10 Mei 2024** untuk **Wilayah 2**.
8. Peserta dapat mengakses Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui tautan <https://tinyurl.com/BahanDesa>. Selain itu, video animasi terkait Pengadaan barang/jasa di desa dapat diakses melalui tautan channel YouTube LKPP <https://bit.ly/video-animasi-pbj-desa>. Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Lingga Sakti (087788631305).
9. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di desa mohon Bapak/Ibu dapat mengisi link sebagai berikut: <https://bit.ly/indeksefektivitasdesa>.

Tembusan :

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP

## Lampiran 2. Daftar Undangan

### **A. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

#### **Batch 2 - Wilayah 1**

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pandeglang
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tangerang
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Banjar
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Demak
32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan
33. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara
34. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
39. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang
40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati
41. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
44. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo
45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
46. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang
47. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen
48. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal
50. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
51. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri
52. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo
53. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
54. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul
55. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kulon Progo
56. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

57. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan
58. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi
59. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar
60. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro
61. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso
62. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
63. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
64. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
65. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kediri
66. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Batu
67. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
68. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang
69. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan
71. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang
72. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
73. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
74. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
75. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
76. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan
77. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
78. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
79. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo
80. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang
81. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo
82. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo
83. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep
84. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek
85. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban
86. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
87. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
88. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
89. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kayong Utara
90. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ketapang
91. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya
92. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Landak
93. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi
94. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mempawah
95. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas
96. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sanggau
97. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau
98. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang
99. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
100. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar
101. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala
102. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan
103. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Tengah
104. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
105. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru
106. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
107. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu
108. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut
109. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
110. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
111. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur
112. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara
113. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas
114. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
115. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan
116. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat

117. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
118. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau
119. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya
120. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
121. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
122. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara
123. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Berau
124. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Barat
125. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
126. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur
127. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mahakam Ulu
128. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
129. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
130. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulungan
131. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau
132. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan
133. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung
134. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
135. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli
136. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
137. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar
138. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana
139. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem
140. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klungkung
141. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
142. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan
143. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima
144. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dompu
145. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat
146. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah
147. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur
148. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Utara
149. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa
150. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat
151. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor
152. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belu
153. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
154. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur
155. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang
156. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lembata
157. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malaka
158. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai
159. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat
160. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Timur
161. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nagekeo
162. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngada
163. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao
164. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua
165. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka
166. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat
167. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya
168. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah
169. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur
170. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan
171. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara

### **Batch 3 - Wilayah 2**

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Barat
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Besar
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Jaya

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Selatan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Singkil
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tamiang
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tengah
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Tenggara
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Timur
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Aceh Utara
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bener Meriah
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bireuen
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gayo Lues
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Banda Aceh
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Langsa
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Lhokseumawe
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sabang
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Subulussalam
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nagan Raya
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pidie
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pidie Jaya
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Humbang Hasundutan
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli
31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Padangsidimpuan
32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu
33. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan
34. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat
36. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal
37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Barat
39. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Selatan
40. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara
41. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pakpak Bharat
44. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir
45. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai
46. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simalungun
47. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan
48. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah
49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
50. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toba Samosir
51. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Agam
52. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya
53. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai
54. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
55. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sawahlunto
56. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lima Puluh Kota
57. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
58. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasaman
59. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasaman Barat
60. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan
61. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sijunjung
62. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok
63. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan
64. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Datar

65. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari
66. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bungo
67. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci
68. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh
69. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin
70. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muaro Jambi
71. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun
72. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat
73. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur
74. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo
75. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu
76. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir
77. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hulu
78. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar
79. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti
80. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
81. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan
82. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hilir
83. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu
84. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Siak
85. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan
86. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun
87. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas
88. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga
89. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna
90. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin
91. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang
92. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih
93. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lahat
94. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim
95. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
96. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas
97. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Utara
98. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir
99. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir
100. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu
101. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
102. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
103. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematani
104. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Selatan
105. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah
106. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara
107. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
108. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepahiang
109. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebong
110. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muko Muko
111. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong
112. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seluma
113. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka
114. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat
115. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Selatan
116. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah
117. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung
118. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur
119. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Barat
120. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
121. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Tengah
122. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur
123. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Utara
124. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji

125. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran
126. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Barat
127. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pringsewu
128. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus
129. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang
130. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat
131. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Way Kanan

## **B. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

### **Batch 2 - Wilayah 1**

1. UKPBJ Kabupaten Lebak
2. UKPBJ Kabupaten Pandeglang
3. UKPBJ Kabupaten Serang
4. UKPBJ Kabupaten Tangerang
5. UKPBJ Kabupaten Bandung
6. UKPBJ Kabupaten Bandung Barat
7. UKPBJ Kabupaten Bekasi
8. UKPBJ Kabupaten Bogor
9. UKPBJ Kabupaten Ciamis
10. UKPBJ Kabupaten Cianjur
11. UKPBJ Kabupaten Cirebon
12. UKPBJ Kabupaten Garut
13. UKPBJ Kabupaten Indramayu
14. UKPBJ Kabupaten Karawang
15. UKPBJ Kota Banjar
16. UKPBJ Kabupaten Kuningan
17. UKPBJ Kabupaten Majalengka
18. UKPBJ Kabupaten Pangandaran
19. UKPBJ Kabupaten Purwakarta
20. UKPBJ Kabupaten Subang
21. UKPBJ Kabupaten Sukabumi
22. UKPBJ Kabupaten Sumedang
23. UKPBJ Kabupaten Tasikmalaya
24. UKPBJ Kabupaten Banjarnegara
25. UKPBJ Kabupaten Banyumas
26. UKPBJ Kabupaten Batang
27. UKPBJ Kabupaten Blora
28. UKPBJ Kabupaten Boyolali
29. UKPBJ Kabupaten Brebes
30. UKPBJ Kabupaten Cilacap
31. UKPBJ Kabupaten Demak
32. UKPBJ Kabupaten Grobogan
33. UKPBJ Kabupaten Jepara
34. UKPBJ Kabupaten Karanganyar
35. UKPBJ Kabupaten Kebumen
36. UKPBJ Kabupaten Kendal
37. UKPBJ Kabupaten Klaten
38. UKPBJ Kabupaten Kudus
39. UKPBJ Kabupaten Magelang
40. UKPBJ Kabupaten Pati
41. UKPBJ Kabupaten Pekalongan
42. UKPBJ Kabupaten Pemalang
43. UKPBJ Kabupaten Purbalingga
44. UKPBJ Kabupaten Purworejo
45. UKPBJ Kabupaten Rembang
46. UKPBJ Kabupaten Semarang
47. UKPBJ Kabupaten Sragen
48. UKPBJ Kabupaten Sukoharjo
49. UKPBJ Kabupaten Tegal
50. UKPBJ Kabupaten Temanggung
51. UKPBJ Kabupaten Wonogiri
52. UKPBJ Kabupaten Wonosobo
53. UKPBJ Kabupaten Bantul
54. UKPBJ Gunung Kidul
55. UKPBJ Kabupaten Kulon Progo
56. UKPBJ Kabupaten Sleman
57. UKPBJ Kabupaten Bangkalan

58. UKPBJ Kabupaten Banyuwangi
59. UKPBJ Kabupaten Blitar
60. UKPBJ Kabupaten Bojonegoro
61. UKPBJ Kabupaten Bondowoso
62. UKPBJ Kabupaten Gresik
63. UKPBJ Kabupaten Jember
64. UKPBJ Kabupaten Jombang
65. UKPBJ Kabupaten Kediri
66. UKPBJ Kota Batu
67. UKPBJ Kabupaten Lamongan
68. UKPBJ Kabupaten Lumajang
69. UKPBJ Kabupaten Madiun
70. UKPBJ Kabupaten Magetan
71. UKPBJ Kabupaten Malang
72. UKPBJ Kabupaten Mojokerto
73. UKPBJ Kabupaten Nganjuk
74. UKPBJ Kabupaten Ngawi
75. UKPBJ Kabupaten Pacitan
76. UKPBJ Kabupaten Pamekasan
77. UKPBJ Kabupaten Pasuruan
78. UKPBJ Kabupaten Ponorogo
79. UKPBJ Kabupaten Probolinggo
80. UKPBJ Kabupaten Sampang
81. UKPBJ Kabupaten Sidoarjo
82. UKPBJ Kabupaten Situbondo
83. UKPBJ Kabupaten Sumenep
84. UKPBJ Kabupaten Trenggalek
85. UKPBJ Kabupaten Tuban
86. UKPBJ Kabupaten Tulungagung
87. UKPBJ Kabupaten Bengkayang
88. UKPBJ Kabupaten Kapuas Hulu
89. UKPBJ Kabupaten Kayong Utara
90. UKPBJ Kabupaten Ketapang
91. UKPBJ Kabupaten Kubu Raya
92. UKPBJ Kabupaten Landak
93. UKPBJ Kabupaten Melawi
94. UKPBJ Kabupaten Mempawah
95. UKPBJ Kabupaten Sambas
96. UKPBJ Kabupaten Sanggau
97. UKPBJ Kabupaten Sekadau
98. UKPBJ Kabupaten Sintang
99. UKPBJ Kabupaten Balangan
100. UKPBJ Kabupaten Banjar
101. UKPBJ Kabupaten Barito Kuala
102. UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Selatan
103. UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Tengah
104. UKPBJ Kabupaten Hulu Sungai Utara
105. UKPBJ Kabupaten Kotabaru
106. UKPBJ Kabupaten Tabalong
107. UKPBJ Kabupaten Tanah Bumbu
108. UKPBJ Kabupaten Tanah Laut
109. UKPBJ Kabupaten Tapin
110. UKPBJ Kabupaten Barito Selatan
111. UKPBJ Kabupaten Barito Timur
112. UKPBJ Kabupaten Barito Utara
113. UKPBJ Kabupaten Gunung Mas
114. UKPBJ Kabupaten Kapuas
115. UKPBJ Kabupaten Katingan
116. UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat
117. UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Timur

118. UKPBJ Kabupaten Lamandau
119. UKPBJ Kabupaten Murung Raya
120. UKPBJ Kabupaten Pulang Pisau
121. UKPBJ Kabupaten Seruyan
122. UKPBJ Kabupaten Sukamara
123. UKPBJ Kabupaten Berau
124. UKPBJ Kabupaten Kutai Barat
125. UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara
126. UKPBJ Kabupaten Kutai Timur
127. UKPBJ Kabupaten Mahakam Ulu
128. UKPBJ Kabupaten Paser
129. UKPBJ Kabupaten Penajam Paser Utara
130. UKPBJ Kabupaten Bulungan
131. UKPBJ Kabupaten Malinau
132. UKPBJ Kabupaten Nunukan
133. UKPBJ Kabupaten Tana Tidung
134. UKPBJ Kabupaten Badung
135. UKPBJ Kabupaten Bangli
136. UKPBJ Kabupaten Buleleng
137. UKPBJ Kabupaten Gianyar
138. UKPBJ Kabupaten Jembrana
139. UKPBJ Kabupaten Karangasem
140. UKPBJ Kabupaten Klungkung
141. UKPBJ Kota Denpasar
142. UKPBJ Kabupaten Tabanan
143. UKPBJ Kabupaten Bima
144. UKPBJ Kabupaten Dompu
145. UKPBJ Kabupaten Lombok Barat
146. UKPBJ Kabupaten Lombok Tengah
147. UKPBJ Kabupaten Lombok Timur
148. UKPBJ Kabupaten Lombok Utara
149. UKPBJ Kabupaten Sumbawa
150. UKPBJ Kabupaten Sumbawa Barat
151. UKPBJ Kabupaten Alor
152. UKPBJ Kabupaten Belu
153. UKPBJ Kabupaten Ende
154. UKPBJ Kabupaten Flores Timur
155. UKPBJ Kabupaten Kupang
156. UKPBJ Kabupaten Lembata
157. UKPBJ Kabupaten Malaka
158. UKPBJ Kabupaten Manggarai
159. UKPBJ Kabupaten Manggarai Barat
160. UKPBJ Kabupaten Manggarai Timur
161. UKPBJ Kabupaten Nagekeo
162. UKPBJ Kabupaten Ngada
163. UKPBJ Kabupaten Rote Ndao
164. UKPBJ Kabupaten Sabu Raijua
165. UKPBJ Kabupaten Sikka
166. UKPBJ Kabupaten Sumba Barat
167. UKPBJ Kabupaten Sumba Barat Daya
168. UKPBJ Kabupaten Sumba Tengah
169. UKPBJ Kabupaten Sumba Timur
170. UKPBJ Kabupaten Timor Tengah Selatan
171. UKPBJ Kabupaten Timor Tengah Utara

**Batch 3 - Wilayah 2**

1. UKPBJ Kabupaten Aceh Barat
2. UKPBJ Kabupaten Aceh Barat Daya
3. UKPBJ Kabupaten Aceh Besar
4. UKPBJ Kabupaten Aceh Jaya
5. UKPBJ Kabupaten Aceh Selatan

6. UKPBJ Kabupaten Aceh Singkil
7. UKPBJ Kabupaten Aceh Tamiang
8. UKPBJ Kabupaten Aceh Tengah
9. UKPBJ Kabupaten Aceh Tenggara
10. UKPBJ Kabupaten Aceh Timur
11. UKPBJ Kabupaten Aceh Utara
12. UKPBJ Kabupaten Bener Meriah
13. UKPBJ Kabupaten Bireuen
14. UKPBJ Kabupaten Gayo Lues
15. UKPBJ Kota Banda Aceh
16. UKPBJ Kota Langsa
17. UKPBJ Kota Lhokseumawe
18. UKPBJ Kota Sabang
19. UKPBJ Kota Subulussalam
20. UKPBJ Kabupaten Nagan Raya
21. UKPBJ Kabupaten Pidie
22. UKPBJ Kabupaten Pidie Jaya
23. UKPBJ Kabupaten Simeulue
24. UKPBJ Kabupaten Asahan
25. UKPBJ Kabupaten Batu Bara
26. UKPBJ Kabupaten Dairi
27. UKPBJ Kabupaten Deli Serdang
28. UKPBJ Kabupaten Humbang Hasundutan
29. UKPBJ Kabupaten Karo
30. UKPBJ Kota Gunungsitoli
31. UKPBJ Kota Padangsidimpuan
32. UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu
33. UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Selatan
34. UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara
35. UKPBJ Kabupaten Langkat
36. UKPBJ Kabupaten Mandailing Natal
37. UKPBJ Kabupaten Nias
38. UKPBJ Kabupaten Nias Barat
39. UKPBJ Kabupaten Nias Selatan
40. UKPBJ Kabupaten Nias Utara
41. UKPBJ Kabupaten Padang Lawas
42. UKPBJ Kabupaten Padang Lawas Utara
43. UKPBJ Kabupaten Pakpak Bharat
44. UKPBJ Kabupaten Samosir
45. UKPBJ Kabupaten Serdang Bedagai
46. UKPBJ Kabupaten Simalungun
47. UKPBJ Kabupaten Tapanuli Selatan
48. UKPBJ Kabupaten Tapanuli Tengah
49. UKPBJ Kabupaten Tapanuli Utara
50. UKPBJ Kabupaten Toba Samosir
51. UKPBJ Kabupaten Agam
52. UKPBJ Kabupaten Dharmasraya
53. UKPBJ Kabupaten Kepulauan Mentawai
54. UKPBJ Kota Pariaman
55. UKPBJ Kota Sawahlunto
56. UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota
57. UKPBJ Kabupaten Padang Pariaman
58. UKPBJ Kabupaten Pasaman
59. UKPBJ Kabupaten Pasaman Barat
60. UKPBJ Kabupaten Pesisir Selatan
61. UKPBJ Kabupaten Sijunjung
62. UKPBJ Kabupaten Solok
63. UKPBJ Kabupaten Solok Selatan
64. UKPBJ Kabupaten Tanah Datar
65. UKPBJ Kabupaten Batanghari

66. UKPBJ Kabupaten Bungo
67. UKPBJ Kabupaten Kerinci
68. UKPBJ Kota Sungai Penuh
69. UKPBJ Kabupaten Merangin
70. UKPBJ Kabupaten Muaro Jambi
71. UKPBJ Kabupaten Sarolangun
72. UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat
73. UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur
74. UKPBJ Kabupaten Tebo
75. UKPBJ Kabupaten Bengkalis
76. UKPBJ Kabupaten Indragiri Hilir
77. UKPBJ Kabupaten Indragiri Hulu
78. UKPBJ Kabupaten Kampar
79. UKPBJ Kabupaten Kepulauan Meranti
80. UKPBJ Kabupaten Kuantan Singingi
81. UKPBJ Kabupaten Pelalawan
82. UKPBJ Kabupaten Rokan Hilir
83. UKPBJ Kabupaten Rokan Hulu
84. UKPBJ Kabupaten Siak
85. UKPBJ Kabupaten Bintan
86. UKPBJ Kabupaten Karimun
87. UKPBJ Kabupaten Kepulauan Anambas
88. UKPBJ Kabupaten Lingga
89. UKPBJ Kabupaten Natuna
90. UKPBJ Kabupaten Banyuasin
91. UKPBJ Kabupaten Empat Lawang
92. UKPBJ Kota Prabumulih
93. UKPBJ Kabupaten Lahat
94. UKPBJ Kabupaten Muara Enim
95. UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin
96. UKPBJ Kabupaten Musi Rawas
97. UKPBJ Kabupaten Musi Rawas Utara
98. UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir
99. UKPBJ Kabupaten Ogan Komering Ilir
100. UKPBJ Kabupaten Ogan Komering Ulu
101. UKPBJ Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
102. UKPBJ Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
103. UKPBJ Kabupaten Penukal Abab Lematian
104. UKPBJ Kabupaten Bengkulu Selatan
105. UKPBJ Kabupaten Bengkulu Tengah
106. UKPBJ Kabupaten Bengkulu Utara
107. UKPBJ Kabupaten Kaur
108. UKPBJ Kabupaten Kepahiang
109. UKPBJ Kabupaten Lebong
110. UKPBJ Kabupaten Muko Muko
111. UKPBJ Kabupaten Rejang Lebong
112. UKPBJ Kabupaten Seluma
113. UKPBJ Kabupaten Bangka
114. UKPBJ Kabupaten Bangka Barat
115. UKPBJ Kabupaten Bangka Selatan
116. UKPBJ Kabupaten Bangka Tengah
117. UKPBJ Kabupaten Belitung
118. UKPBJ Kabupaten Belitung Timur
119. UKPBJ Kabupaten Lampung Barat
120. UKPBJ Kabupaten Lampung Selatan
121. UKPBJ Kabupaten Lampung Tengah
122. UKPBJ Kabupaten Lampung Timur
123. UKPBJ Kabupaten Lampung Utara
124. UKPBJ Kabupaten Mesuji
125. UKPBJ Kabupaten Pesawaran

126. UKPBJ Kabupaten Pesisir Barat
127. UKPBJ Kabupaten Pringsewu
128. UKPBJ Kabupaten Tanggamus
129. UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang
130. UKPBJ Kabupaten Tulang Bawang Barat
131. UKPBJ Kabupaten Way Kanan

Lampiran 3. Agenda Kegiatan Pendampingan

**Agenda Kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Sosialisasi Model Dokumen Swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa**

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
<b>Selasa/Rabu (7 Mei 2024/8 Mei 2024) dan Selasa/Rabu (21 Mei 2024/22 Mei 2024)</b>			
1.	08.30 - 09.00	Registrasi peserta	Panitia
2.	09.00 - 09.10	Pembukaan Acara	MC
3.	09.10 - 09.15	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta
4.	09.15 - 09.30	Sambutan dan Arahan Kegiatan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP
5.	09.30 – 10.00	Pemaparan prioritas penggunaan dana desa	Kemendes PDDT Direktur fasilitasi pemanfaatan dana desa
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	<i>Diserved</i>
6.	10.00 – 10.30	Pemaparan materi: Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP
7.	10.30 – 12.00	Diskusi dan tanya jawab	Seluruh Peserta
8.	<b>12.00 - 13.30</b>	<b>ISHOMA</b>	
9.	13.30 - 14.30	Sosialisasi MDP Swakelola PBJ Desa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP
	14.30 – 15.00	<i>Coffee Break</i>	<i>Diserved</i>
10.	14.30 - 15.30	Sosialisasi Konsep Pengukuran Kematangan PBJ Desa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP
11.	15.30 - 16.30	Diskusi dan tanya jawab	Seluruh Peserta
12.	16.30 - 16.45	Penutupan	MC